

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di sektor pengadaan berbasis pada dua skema yaitu penyalahgunaan anggaran dan penyelewengan jabatan. Informasi empiris penegakan hukum tindak pidana korupsi, menerangkan bahwa kerugian keuangan Negara terbesar pada modus penyelewengan jabatan namun frekuensi korupsi tertinggi terjadi pada perbuatan melawan hukum penyalahgunaan anggaran. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan melawan hukum pada Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Benih Tebu di Kabupaten Pati pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Faktor-faktor yang mempengaruhi, penegakan hukum ke depan guna mengurangi tindak pidana korupsi di sektor pengadaan. Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis dengan teori Penegakan Hukum dan teori Sistem Hukum. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perbuatan melawan hukum berupa pengadaan benih tebu berbasis proyek fiktif, berujung pada kerugian keuangan Negara sebesar Rp 2.038.616.969,00. Delik korupsi pelaku adalah memperkaya diri dan terbukti berdasarkan laporan Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tindak pidana korupsi terjadi karena malfungsi struktur pengadaan, dengan tujuan (*mens rea*) terdakwa adalah mencuri uang Negara. Putusan majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selain itu menghukumnya untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 393.794.269,-. Faktor yang mempengaruhi tipikor ini meliputi struktur pengadaan yang tidak berfungsi dengan efektif dan etika moral pejabat publik yang lemah dalam menjalankan amanah kewenangan jabatannya. Proyeksi penegakan hukum ke depan guna mengurangi tindak pidana korupsi di sektor pengadaan membutuhkan substansi hukum guna menutup celah niat dan peluang korupsi. Tahapan logisnya adalah menegaskan ulang kebutuhan Hukum Tata Negara pada sub politik anggaran. Hukum Administrasi Negara dalam ranah sub perencanaan sampai dengan penetapan pemenang pengadaan. Hukum Perdata diperlukan menutup celah korupsi pada pelaksanaan pengadaan. Jika jaring hukum tersebut tidak efektif maka perlu hadirnya hukum pidana, pemilihan pejabat publik berintegritas, serta mendorong munculnya *whistle blower*.

**Kata Kunci :perbuatan, melawan hukum, korupsi, pengadaan barang dan jasa**

## **ABSTRACT**

*Corruption in the procurement sector is based on two schemes, namely budget misuse and misappropriation of office. Empirical information on law enforcement on criminal acts of corruption, explains that the greatest financial loss of the State is in the mode of abuse of office, but the highest frequency of corruption occurs in acts against the law of budget misuse. This thesis aims to find out and analyze unlawful acts in the Corruption Act of Sugar Cane Procurement in Pati Regency in the Central Java Provincial Plantation Office, Influencing Factors, law enforcement going forward to reduce corruption in the procurement sector. The approach method used is sociological juridical. Primary data obtained through interviews while secondary data obtained through literature study. Then the data that has been obtained are analyzed using qualitative descriptive techniques. The research problem was analyzed with Law Enforcement Theory and Law System Theory. The results of this study revealed that the act against the law in the form of procurement of sugar cane seeds based on a fictitious project, resulted in a state financial loss of Rp 2,038,616,969.00. Perpetual corruption offense is enriching and proven based on an Audit report from the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The criminal act of corruption occurred because of a malfunction in the procurement structure, with the aim (mens rea) of the defendant being to steal state money. The verdict of the panel of judges sentenced the defendant to imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah). Besides punishing him to pay a replacement money of Rp. 393,794,269.-. Factors influencing this corruption include the procurement structure that does not function effectively and the moral ethics of public officials who are weak in carrying out the mandate of their office authority. Future projections of law enforcement in order to reduce corruption in the procurement sector require legal substance to close the gaps in corruption intent and opportunities. The logical stage is to reaffirm the need for Constitutional Law in the budget sub-politics. State Administrative Law in the realm of sub-planning up to the determination of the winner of the procurement. Civil law is needed to close the gaps in corruption in the implementation of procurement. If the legal net is ineffective, it is necessary to have a criminal law, election of public officials with integrity, and encourage the emergence of whistle blowers.*

**Keywords:** *acts, against the law, corruption, procurement of goods and services*